

E-Budgeting dan E-Planning untuk melawan Korupsi



<https://kalsel.antaranews.com/berita/111816/kpk-monitoring-dan-evaluasi-program-pemberantasan-korupsi-terintegrasi>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, di Ruang Barakat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, Rabu (31/7).¹ Pada kesempatan tersebut, Bupati Tanah Laut H Sukamta mengatakan, ada beberapa hal yang akan dievaluasi pada bidang perencanaan dan anggaran yang menyangkut rencana kerja SKPD. "Rencana kerja SKPD mengacu pada RPJMD, termasuk evaluasi e-planning, e-budgeting, e-monev yang merupakan bagian dari tata kelola perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah," ucapnya.²

¹ <https://kalsel.antaranews.com/berita/111816/kpk-monitoring-dan-evaluasi-program-pemberantasan-korupsi-terintegrasi>, diakses pada 18 September 2019

² *ibid*, diakses pada 18 September 2019

Selain Kabupaten Tanah Laut, Kota Banjarmasin juga mengikuti acara evaluasi pencegahan korupsi terintegrasi yang diadakan oleh KPK, dalam acara tersebut dijelaskan oleh Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK RI untuk wilayah Kalimantan Candra mengatakan, program aksi ini dapat mencegah 80 persen kegiatan korupsi, yakni dengan cara kegiatan sistem E-Planning, E-Budgeting secara online, artinya semua akan terprogram dan transparan.³

Sumber Berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/111816/kpk-monitoring-dan-evaluasi-program-pemberantasan-korupsi-terintegrasi>, KPK Monitoring Dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, Selasa, 17 September 2019.
2. <https://kalsel.prokal.co/read/news/11099-kpk-e-planning-dan-e-budgeting-cegah-korupsi.html>, KPK: E-Planning dan E-Budgeting Cegah Korupsi, Kamis, 07 September 2017.

Catatan:

📌 Sumber Catatan Berita:

https://www.academia.edu/27216112/E-Budgeting_untuk_Melawan_Korupsi_APB (“E-Budgeting untuk Melawan Korupsi APBD”; Lisniati Dzumiroh), diakses pada 18 September 2019.

📌 Pengertian E- Budgeting:

E-budgeting merupakan sistem informasi berbasis web yang digunakan untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah. Melalui e-budgeting, pemerintah dapat melakukan pengendalian anggaran dengan lebih baik karena proses penyusunan anggaran dapat dilakukan secara lebih transparan, tepat waktu, anggaran dapat dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dalam program kerja, kronologis anggaran dapat ditelusuri dengan jelas, dan pembuatan laporan seputar realisasi anggaran dapat dibuat dengan lebih mudah.⁴

📌 Hubungan E-Budgeting dan Anti Korupsi

³ <https://kalsel.prokal.co/read/news/11099-kpk-e-planning-dan-e-budgeting-cegah-korupsi.html>, diakses pada 18 September 2019

⁴ https://www.academia.edu/27216112/E-Budgeting_untuk_Melawan_Korupsi_APB (“E-Budgeting untuk Melawan Korupsi APBD”; Lisniati Dzumiroh), diakses pada 18 September 2019.

Dengan menggunakan sistem e-budgeting, pengajuan anggaran belanja dan nilainya dapat dilakukan cross check and balance dan tracking dalam peng-input-annya lebih mudah. Dari sisi audit, akan lebih mudah menemukan jejak audit (audit trail) dalam penggunaan sistem ini.⁵

✚ Ketentuan terkait:

“Aturan resmi yang mengatur tentang pelaksanaan pemerintahan elektronik khususnya e-budgeting memang belum secara implisit ada. Secara eksplisit, pelaksanaan e-budgeting tertuang dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah nomor 23 Tahun 2014 BAB XXI tentang Inovasi Daerah. Lebih rinci lagi, semangat dalam Inovasi Daerah tersebut dijelaskan dalam Pasal 386 ayat (1) bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggara Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Dalam pasal selanjutnya 387 dijelaskan secara rinci prinsip dalam merumuskan inovasi daerah diantaranya, a) peningkatan efisiensi, b) perbaikan efektivitas, c) perbaikan kualitas pelayanan, d) tidak ada konflik kepentingan, e) berorientasi kepada kepentingan umum dan f) dilakukan secara terbuka. Secara prinsip dan semangat sebenarnya inovasi e-budgeting sudah sesuai dengan aturan pelaksanaan pemerintahan daerah.”⁶

✚ Pengembangan E-Budgeting di masa depan:

“Dalam hal regulasi, dan implementasi perbaikan e-budgeting, Pemprov DKI Jakarta juga perlu sepeham dan berkomitmen melembagakan dengan membuat payung hukum Perkada, dan juga melembagakan pengelolaan e-budgeting dalam lembaga independen seperti Budget Office di Filipina, Amerika dan Korea Selatan. Pelembagaan ini dapat mengakhiri ego sektoral Pemprov dan DPRD sehingga data dan rancangan penyusunan yang dikeluarkan lembaga independen tersebut dapat diterima kedua belah pihak. Presiden bersama Menteri terkait perlu membuat payung hukum terkait inovasi pemerintahan daerah untuk melegalkan aturan hukum tentang e-budgeting, konsep pelaksanaan dan tata cara implementasi dan evaluasinya. Bentuk payung hukum dan panduan ini bisa berupa Peraturan Pemerintah dari UU Pemerintah Daerah No. 23 tahun 2014 ataupun keputusan presiden yang mampu diterapkan didaerah. Secara global, dalam visi pemerintahan masa depan, Presiden juga perlu cepat mengeluarkan regulasi e-budgeting dan e-government secara nasional agar

⁵ Ibid

⁶ Ibid

Pemerintah pusat dan daerah siap dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi Asia 2015. Sebagai modal, mari berkaca dengan kinerja pemerintah Korea Selatan, dengan menerapkan e-budgeting dan e-government berdampak pada rendahnya tingkat korupsi dan akselerasi pembangunan ekonomi. Secara statistik, tahun 2012-2014, dalam survey E-Government Development Indeks (EGDI), Negara K-Pop ini mampu menempati urutan pertama di dunia dan Asia dengan angka 0.9283, Indeks Perception Corruption mendapat peringkat 43 di dunia dan kinerja pertumbuhan ekonomi mencapai 7,2 persen.”⁷

⁷ Ibid.